

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL YANG MELAKUKAN ALIH MUAT TANPA IZIN DI KANTOR KSOP BATAM

Hendri Kurniawan
NIM. 180574201119

ABSTRAK

Menurut UNCLOS 1982 Pasal 24 Ayat 1, Kapal Asing diperbolehkan melintas pelayaran nasional dengan persyaratan yang berlaku. Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu bagian Laut Bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif dimana segala aturan pelayaran dibebankan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Batam . Dalam perjalanannya aturan tersebut, nyatanya, Masih banyak kapal Luar negeri alih muat tanpa izin di laut dan melanggar aturan yang tertera dalam Undang Undang No 17 Tahun 2008. Maka, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Melakukan Alih Muat Tanpa Izin di Laut Wilayah KSOP Khusus Batam serta hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Melakukan Alih Muat Tanpa Izin Di Laut Wilayah KSOP Khusus Batam. Dalam Penelitian ini, metode yang di gunakan adalah metode normatif empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Adapun pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach) , yakni pendekatan yang berfokus kepada Ratio Decidendi (alasan hukum) dengan memperhatikan fakta materiel berupa orang, tempat, waktu, dan lain lain. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan analisis kualitatif dengan sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitan tersebut adalah ditemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan alih muat tanpa izin di laut. Faktor faktor tersebut yaitu Faktor Hukum(Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana dan faktor kebudayaan serta pengguna jasa. Adapun hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan alih muat tanpa izin di laut wilayah KSOP khusus Batam yang paling utama yaitu kurangnya pengguna jasa dan juga sarana dan prasarana KSOP Batam yang kurang memadai.

Kata Kunci: Zona Ekonomi Eksklusif, Laut, Kapal Asing, Aturan, Undang-Undang, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

**LAW ENFORCEMENT AGAINST SHIP THAT DOES TRANSFER
WITHOUT PERMISSION IN OF KSOP OFFICE BATAM**

By
Hendri Kurniawan
NIM. 180574201119

ABSTRACT

According to UNCLOS 1982 Article 24 Paragraph 1, foreign vessels are allowed to cross national shipping with applicable requirements. Batam, Riau Islands becomes one part of the Free Sea or Exclusive Economic Zone where all shipping rules are charged to the Batam Harbormaster's Office and Port Authority (KSOP) In the course of these rules, in fact, there are still many foreign ships .transferring unauthorized loading at sea and violating the rules stated in Law No. 17 of 2008. So, this research aims to find out how the Law Enforcement Against Vessels Conducting Unauthorized Transfer of Loading at Sea in the Special KSOP Area of Batam and the obstacles faced in Law Enforcement Against Vessels Conducting Unauthorized Transfer of Loading at Sea in the Special Harbormaster's Office and Port Authority (KSOP) Area of Batam. In this research, the method used is the method applied law search, which is a research that uses normative-empirical legal case studies in the form of legal behavior products. The problem approach used in this research is a case approach, which is an approach that focuses on Ratio Decidendi (legal reasoning) by paying attention to material facts in the form of people, places, times, and others. While the data analysis technique in this research is through a qualitative analysis approach with the main data sources, such as the results of interviews and observations. The result of the research is that there are factors that influence law enforcement against ships that transfer loading without permission at sea. These factors are Legal Factors (Law), law enforcement factors, infrastructure factors and cultural factors and local community habits. As for the obstacles in enforcing the law against ships that transfer loading without a license at sea in the Batam special KSOP area, the most important is the lack of public awareness and also the inadequate facilities and infrastructure of Batam's Harbormaster's Office and Port Authority (KSOP).

Keywords: Exclusive Economic Zone, Sea, Foreign Vessels, Rules, Laws,, Harbor Master And Port Authority Office (KSOP).